

Perpustakaan Desa Adaka Jaya Konsel dan Owner Kopi Tolaki Raih Penghargaan Tingkat Nasional

Konsel, SultraNET. | Kabupaten Konawe Selatan kembali meraih penghargaan bergengsi di tingkat Nasional. Kali ini didapatkan melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD). Salah satu perpustakaan di tingkat Desa di Konsel jadi terbaik nasional.

Fasilitator Daerah/PIC penanggung jawab program TPBIS Konsel, Hj.Asni,S.Sos.M.Ap mengatakan Perpustakaan Desa Adaka Jaya Kecamatan Buke dinobatkan jadi terbaik tahun 2023 tingkat nasional.

“Penghargaan itu dalam hal inovasi promosi layanan perpustakaan desa, dan implementasi program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS),” ungkapnya.

Dikatakannya, penghargaan diserahkan langsung Kepala Deputi Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Sumberdaya Manusia Perpusnas RI, Dra.Nani Suryani,M.Si. Pada kegiatan Peer Learning Meeting (PLM) Nasional, di Hotel Alana, Yogyakarta, Rabu (20/9) malam.

“Penghargaan diterima oleh PIC pengelola perpustakaan Desa Adaka Jaya, Muh Fajri didampingi Fasilitator Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam program TPBIS,” ujarnya.



Perpustakaan Desa Adaka Jaya Konsel dan Owner Kopi Tolaki saat menerima Piagam Penghargaan

Tak hanya itu, penghargaan juga diberikan kepada Owner dari Kopi Tolaki, Asri Sape. Ia dinilai sebagai tokoh Zero to Hero, penerima dampak dari implementasi program TPBIS. Merupakan binaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Konsel yang mampu memberdayakan masyarakat.

Sebagai informasi Penghargaan tokoh Zero to Hero diterima oleh fasilitator daerah program TPBIS Konsel. Diserahkan Kepala Perpustakaan RI yang diwakili Kepala Deputy Bidang Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia, Dra.Nani Suryani,M.Si. **(KominfoKonsel)**

45 TENAGA AHLI P3MD IKUT PELATIHAN INOVASI PSDM

Seiring dengan arah kebijakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang telah menetapkan bahwa penggunaan Dana Desa Tahun 2019 diprioritaskan salah satunya untuk pencegahan stunting. Serta dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, khususnya pada Pasal 6 diatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (stunting).

Kebijakan ini, diharapkan akan turut berkontribusi dalam pencapaian target RPJMN 2015-2019 yakni menurunkan prevalensi stunting dari 37,2% (Data Riskesdas 2013) menjadi 28% di Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) mengamanatkan bahwa masyarakat harus berperan aktif dalam pembangunan desa. Intervensi pencegahan stunting harus melalui konvergensi program yang melibatkan pelaku lintas sektor di tingkat Pusat, Daerah, dan Desa. Untuk itu maka dibutuhkan kesiapan dan kapasitas yang memadai oleh masyarakat dan pemerintah desa selaku pelaku pembangunan yang bersentuhan langsung dengan sasaran, khususnya kepada rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Untuk mendukung Program Pemerintah tersebut, Sebanyak 45 Orang Tenaga Ahli P3MD dari 15 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara mengikuti kegiatan Pelatihan Inovasi PSDM Tenaga Ahli P3Md Tingkat Kabupaten Tahun Anggaran 2019 yang berlangsung dari Tanggal 1 s/d 5 Mei 2019 di Hotel Horison Ultima, Bandung, Jawa Barat.

Pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para Pendamping Desa tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Kepala Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 090/622/DPMD tanggal 26 April 2019.

Salah satu peserta Pelatihan dari Abady Makmur (Tenaga Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Buton Selatan menjelaskan bahwa Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 diperoleh fakta bahwa

bayi usia di bawah lima tahun (balita) yang menderita stunting mencapai 30,8%. Artinya, sebanyak 7 juta balita di Indonesia saat ini yang merupakan generasi bangsa terancam kurang memiliki daya saing di masa depan. Untuk itu, TA PMD yang pernah menjabat sebagai Legialator ini menuturkan jika upaya Pencegahan dan penanganan stunting sangat dibutuhkan melalui konvergensi untuk memastikan generasi muda Indonesia memiliki masa depan yang cerah.

Adapun kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (stunting) yang meliputi:

1. penyediaan air bersih dan sanitasi;
2. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
3. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
4. bantuan Posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
5. pengembangan apotik hidup Desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
6. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
7. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Masih lanjut Tenaga Ahli yang akrab disapa dengan Panggilan Bang AM menuturkan bahwa pencegahan stunting di Desa meliputi Fasilitasi konvergensi. Fasilitasi konvergensi dimaksud berupa pendampingan kepada Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa untuk mengarahkan pilihan penggunaan Dana Desa kepada kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang berdampak langsung pada percepatan pencegahan stunting yang dikelola secara terpadu dengan sumber-sumber pembiayaan pembangunan lainnya.

Pendampingan dalam pencegahan stunting di Desa dilakukan oleh tenaga pendamping masyarakat Desa dan Kader Pembangunan Manusia (KPM). Namun demikian kegiatan pendampingan dimaksud juga dimungkinkan dilakukan oleh berbagai pegiat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

“Untuk mempermudah kerja KPM dalam konvergensi pencegahan stunting di Desa, maka selaku Tenaga Ahli akan segera berkoordinasi dengan Pihak Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam rangka memastikan tersedianya

regulasi berupa Perbup Penanganan Stunting”, pungkasnya.

Laporan : Hir

Sumber :

<https://www.harapansultra.com/45-tenaga-ahli-p3md-ikut-pelatihan-inovasi-psdm/>